

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Partisipasi politik sangat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat diwujudkan. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik. (Elly M. Setiadi & Usman Kolip 2013:127-128).

Melihat realitas yang ada, tingkat partisipasi politik di Indonesia pada saat pemilu tahun 2019 meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Jika dibandingkan tahun 2014, peningkatan angka partisipasi hampir 10 persen. Viryan menyatakan angka partisipasi 81 persen tersebut melampaui target nasional dari KPU yang menargetkan partisipasi di angka 77,5 persen. Menurut data yang dihimpun KPU, jumlah pemilih Pemilu 2019 yang berada di dalam maupun luar negeri mencapai 199.987.870. Sementara, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak.

158.012.506. (<https://www.theindonesianinstitute.com/meningkatnya-partisipasi-pemilih-dalam-pemilu-2019/>)

Peningkatan partisipasi pada Pemilu 2019 menjadi catatan positif, ditengah rapor merah penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak efisien dan memakan korban jiwa petugas KPPS.

Bahkan jauh sebelum pelaksanaan pencoblosan suara, Pemilu 2019 dibayang-bayangi oleh rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya gerakan yang mengajak untuk tidak memilih atau “Golput”. Gerakan tersebut diinisiasi oleh beberapa kelompok seperti Komunitas ‘Saya Milenial Golput’ (SGM) serta ‘Koalisi Masyarakat Sipil’. Walaupun pada kenyataannya gerakan ini tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi pemilih untuk golput.

Di sisi lain, penulis juga mengutip pendapat McClosky dalam (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007:129) tentang partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui proses pemilihan penguasa. Dengan demikian, baik langsung maupun tidak langsung, partisipasi politik juga merupakan bagian dalam proses pembentukan kebijakan umum. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 juga perlu diikuti dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan lima tahun kedepan.

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan tersebut, bukan hanya ditingkat nasional melainkan di semua tingkat pemerintahan. Ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat dilakukan, misalnya, melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selama ini diterapkan. Diharapkan juga agar partisipasi masyarakat bukan hanya berhenti pada proses pembuatan kebijakan, namun juga pada aspek pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah lima tahun ke depan. Dengan

demikian, produk kebijakan yang dihasilkan oleh para pejabat yang dipilih oleh rakyat akan bersifat inklusif, akuntabel, relevan, dan transparan.

(<https://www.theindonesianinstitute.com/meningkatnya-partisipasi-pemilih-dalam-pemilu-2019/>)

Tingginya tingkat partisipasi politik di Indonesia pada pemilu 2019 juga dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang lebih terbuka dan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, salah satunya masyarakat adat. Budaya politik masyarakat kampung adat cenderung bersifat parokial, karena masyarakat kampung adat tipe budaya politik yang paling rendah, maka dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka ialah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasi diri pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak mempunyai perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

Salah satu masyarakat kampung adat yang merasakan hal perubahan pada budaya politik adalah masyarakat adat kampung naga. Dimana yang sebelumnya masyarakat adat kampung naga cenderung kepada tipe budaya politik parokial yang dimana masyarakatnya tidak memiliki rasa minat atau kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan seiringnya perkembangan jaman yang semakin berkembang masyarakat adat kampung naga sudah mengalami pergeseran tipe budaya politik dari tipe budaya politik parokial menjadi tipe budaya politik subyektif.

Dengan bergesernya budaya politik yang tadinya parokial menjadi subyektif yang terjadi di masyarakat adat kampung naga, hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Perbedaan hal itu sangat dirasakan oleh masyarakat adat kampung naga yang dahulunya

mereka selalu mengikuti alur yang sudah di tentukan oleh pemangku adat dalam memilih suatu wakil daerah dan calon presiden dalam pemilu. Pada zaman orde baru misalnya, para pemangku adat mengharuskan masyarakat kampung naga agar mendukung dan memilih calon dari partai atau golongan yang dominan.

Pasca Orde Baru, masyarakat adat kampung naga telah diberi kebebasan dalam menentukan pilihan mereka dalam berpartisipasi politik. Meskipun begitu, masyarakat tetap diberi arahan agar tidak salah memilih. Pemangku adat biasanya menganjurkan untuk memilih calon-calon yang dikenal oleh masyarakat kampung naga. Hal tersebut bukan suatu usaha untuk mengintervensi pilihan masyarakat. Masyarakat adat kampung naga tetap memiliki hak untuk memilih siapapun bahkan memiliki hak untuk tidak memilih.

Budaya politik subyek yang ditunjukkan oleh masyarakat kampung naga bukan semata-mata tentang kebebasan memilih dalam pemilu saja, tetapi ada aturan lain yang diterapkan. Salah satu contohnya adalah di lingkungan kampung adat naga tidak diperbolehkan memasang atribut kampanye salah satu calon secara dominan. Hal tersebut untuk mencegah adanya persepsi bahwa masyarakat adat kampung naga hanya mendukung salah satu calon dalam pemilu.

Budaya politik subyek adalah suatu bentuk budaya yang berprinsip bahwa anggota masyarakat mereka yang memiliki pengetahuan cukup dan kadang-kadang turut serta dalam aktivitas politik meskipun mereka tidak menentukan proses politik disebut sebagai masyarakat berbudaya subyek. (Kusmayadi, Edi. 2015:19).

Istilah partisipasi seperti telah disinggung di atas, berkaitan erat dengan analisis politik modern negara-negara dunia ketiga atau ada kaitannya dengan pembangunan politik negara-negara berkembang. Maka dalam konteks ini, istilah partisipasi yang diambil dalam bahasa

inggris, “participation” yang secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam hal ini menurut pendapat I.L.Pasaribu & B.Simanjuntak, (1986-349) yang membuat rumusan pengertian partisipasi dengan meninjau beberapa dimensi, bahwa partisipasi dapat juga dalam bentuk buah pikiran yang diberikan dalam bentuk pertemuan, anjang sana dan sebagainya. Sedangkan partisipasi dalam bentuk tenaga seperti misalnya kegiatan yang diberikan untuk perbaikan salah satu pembangunan Desa, dan sebagainya. Demikian juga, partisipasi dapat juga dilihat dari keikutsertaan seseorang memberikan harta benda; partisipasi baik itu dalam bentuk keterampilan dan kemahiran dan yang terakhir, adalah berkaitan erat dengan partisipasi dalam bentuk (partisipasi sosial) terlihat seperti, bentuk-bentuk koperasi, paguyuban, gotong royong, dan sebagainya yang sejenis dengan itu. (P. Anthonius Sitepu 2012:93)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilu tahun 2019. Penulis juga ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pergeseran budaya politik di kampung adat naga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilihan umum tahun 2019 ?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh

sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Partisipasi Masyarakat Adat Kampung Naga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019”.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Model partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu, khususnya pada partisipasi politik guna menunjang perkembangan ilmu politik. Selain itu penelitian ini pun diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik, khususnya pada partisipasi politik dan sistem pemilu.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat menyebarluaskan informasi serta masukan tentang Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan kepada partai politik, pengamat politik, akademisi, mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini.